

KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN DI INDONESIA

TEMUAN INTERIM PENELITIAN



Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM.



2 petugas syahbandar

ribuan Surat Izin Melaut (SIM)



5 petugas cek fisik

8.400 kapal



Minim Sarjana Perikanan
Banyak Sarjana Agama

4.000 SIM



RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemetaan berbagai permasalahan di sektor kelautan?
2. Bagaimana implementasi berbagai kebijakan yang telah dibuat?
3. Bagaimana kebijakan strategis pembangunan ekonomi kelautan yang dibutuhkan bagi penguatan sektor kelautan Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui kebijakan strategis pengelolaan pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia dan menganalisis permasalahan yang terjadi.

KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan Akademik: Mengembangkan wawasan dan memperkuat khasanah pengetahuan berkaitan dengan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan.

Kegunaan Praktis: Bahan bagi Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

PENDEKATAN PENELITIAN

Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

UNIT ANALISIS

Primer: Kementerian dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, *Indonesia Maritim Centre* (IMC), Aliansi Nelayan Indonesia (ANI), Koperasi/perkumpulan nelayan, Perbankan/lembaga keuangan, dan Akademisi.

Sekunder: Badan Pusat Statistik (BPS), literatur (buku-buku referensi, jurnal), Sekretariat Komisi IV DPR RI, dan Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Perikanan.

TEKNIK SAMPLING

Indepth Interview dan diskusi kelompok terfokus.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Menggunakan pedoman wawancara.

TEKNIK ANALISIS DATA

Menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu metode analisis data interaktif, di mana aktivitas reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data yang dikumpulkan sudah jenuh.



1 Pelabuhan Ikan Pandeglang

- Tidak ada *cold storage*
- Transaksi di tengah laut/ Pelabuhan Muara Baru/ Pelabuhan Muara Angke
- Transaksi tidak tercatat



Kebijakan pemerintah daerah kurang mendukung ekonomi nelayan. Pengurangan pasir laut antara Desa Lontar dan Pulau Tunda Kabupaten Serang memengaruhi budidaya ikan bandeng dan hutan mangrove.



Kebijakan pemerintah pusat sulit diterapkan di daerah.

Pemerintah Provinsi Banten menetapkan rencana zonasi laut berbenturan dengan kebijakan nasional fasilitas di zona konservasi laut atau zona ekonomi laut.

Kepentingan Banten di zona laut yang saling tumpang tindih:

- pertambangan (pipa gas bawah laut);
- kelistrikan (PLN);
- telekomunikasi (pipa kabel fiber optik bawah laut); dan
- zona perikanan tangkap.



Kebijakan sertifikasi nelayan terkendala beberapa prasyarat:

- pendidikan minimal setingkat SMA (banyak yang tidak berpendidikan formal/hanya pendidikan dasar).
- partisipasi di pendidikan dan pelatihan (mengeluarkan biaya dan mengurangi waktu bekerja).



Kondisi ekonomi:

- sangat dekat dengan krisis dan ketidakpastian;
- mudah terlibat rentir dan jatuh miskin;
- asuransi nelayan belum banyak membantu karena prasyarat sulit dipenuhi dan proses klaim rumit.



Tawaran solusi:

- pembangunan pelabuhan baru yang inklusif memenuhi kebutuhan nelayan;
- moratorium PNS dan dukungan anggaran;
- pengembangan perikanan budidaya; dan
- peningkatan pemberdayaan masyarakat nelayan terutama pada masa krisis.



Kebijakan Strategis untuk pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia:

- pengembangan teknologi perikanan yang tepat guna;
- menjaga tidak terjadi *overfishing* di WPPNRI dengan menjaga 80% jumlah tangkapan yang diperbolehkan/*maximum sustainable years* (MSY) yaitu 6,5 juta ton per tahun;
- meningkatkan daya saing produk industri hasil perikanan;
- menyediakan benih dan pakan untuk perikanan budidaya (saat ini masih tergantung impor);
- pemasaran dan efektif, efisien, dan akuntabel;
- menjamin tata ruang untuk nelayan dan usaha budidaya perikanan nasional.

